LAPORAN
HASIL PELAKSANAAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
PADA PENGGUNA LAYANAN DI PENGADILAN NEGERI SANGATTA
PERIODE TRIWULAN III TAHUN 2026

PENGADILAN NEGERI SANGATTA
TAHUN 2026

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi pada Pengguna Layanan di Pengadilan Negeri Sangatta

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah jo Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2026 Tentang Syarat dan Teknik Pengusulan Unit Kerja/Satuan Kerja Menuju WBK/WBBM serta Pelaksanaan Survei Mandiri ZI Tahun 2026

Periode Triwulan III Tahun 2026

Disahkan di Sangatta
Pada hari Rabu, 30 September 2026

Ketua Pengadilan Negeri Sangatta	**Ketua Tim Survei**
Christina Simanullang	**Budiyanto Wisnu Wardana**

KATA PENGANTAR

Pemerintah secara berkelanjutan dan bertanggung jawab membutuhkan informasi yang akurat dan terukur dari unit pelayanan pada setiap instansi pemerintah guna memperoleh gambaran objektif mengenai Anti Korupsi publik yang diberikan kepada masyarakat. Informasi tersebut menjadi salah satu dasar dalam proses evaluasi, pengambilan kebijakan, serta perbaikan berkelanjutan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), khususnya dalam aspek pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Dalam konteks pelayanan peradilan, pengadilan sebagai garda terdepan dalam memberikan layanan kepada masyarakat pencari keadilan dituntut untuk senantiasa meningkatkan Anti Korupsi yang tidak hanya cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip integritas dan bebas dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Oleh karena itu, diperlukan suatu instrumen yang mampu mengukur secara objektif tingkat kepuasan masyarakat serta persepsi publik terhadap integritas aparatur peradilan khususnya pada satuan kerja Pengadilan Negeri Sangatta.

Sejalan dengan hal tersebut, Pengadilan Negeri Sangatta melaksanakan Survei Zona Integritas yang terdiri atas *Survei Persepsi Anti Korupsi* dan *Survei Persepsi Anti Korupsi*. Pelaksanaan survei ini bertujuan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan serta menilai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap upaya pencegahan praktik KKN di lingkungan peradilan.

Pelaksanaan survei ini didasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah jo Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2026 tentang Syarat dan Teknik Pengusulan Unit Kerja/Satuan Kerja Menuju WBK/WBBM serta Pelaksanaan Survei Mandiri ZI Tahun 2026

Melalui pelaksanaan survei ini, diharapkan Pengadilan Negeri Sangatta dapat memperoleh data dan informasi yang valid sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan Anti Korupsi serta memperkuat budaya anti korupsi di lingkungan kerja. Selain itu, hasil survei ini juga diharapkan dapat menjadi tolok ukur dalam menilai capaian kinerja pelayanan publik serta sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat.

Sangatta, 30 September 2026

Ketua Pengadilan Negeri Sangatta



Christina Simanullang

DAFTAR ISI

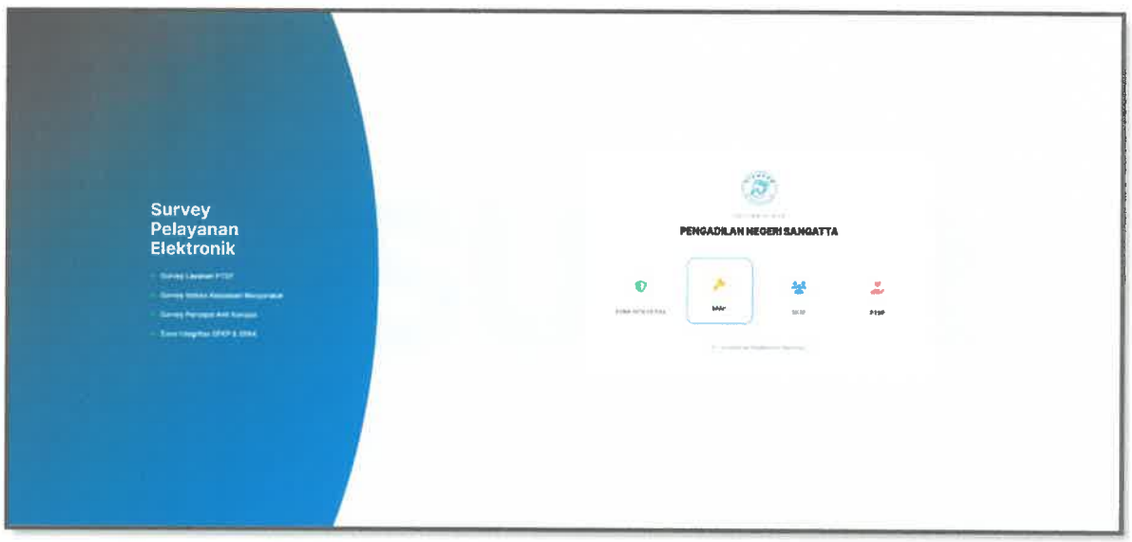
LEMBAR PENGESAHAN ii
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI v
BAB I KUESIONER SURVEI 1
BAB II METODOLOGI SURVEI 7
A. KRITERIA RESPONDEN 7
B. METODE PENCACAHAN 10
C. METODE PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS 11
BAB III PENGOLAHAN SURVEI 13
A. ANALISIS HASIL SURVEI 13
B. TINDAK LANJUT HASIL SURVEI 29
BAB IV DATA SURVEI 31
A. DATA RESPONDEN 31
B. DATA DUKUNG LAINNYA 28

BAB I
KUESIONER SURVEI

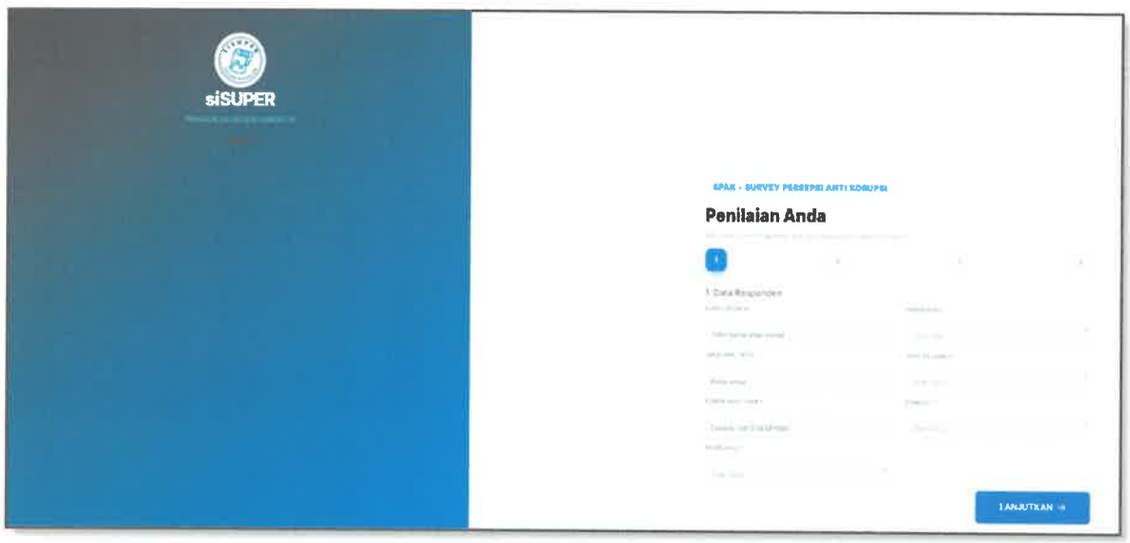
Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bersih dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Pengadilan Negeri Sangatta senantiasa berkomitmen secara berkelanjutan melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan sebagai langkah nyata dalam mewujudkan peningkatan kualitas layanan public pada Lembaga peradilan. Untuk itu, survei yang dilakukan secara berkala menjadi salah satu dasar dalam melakukan evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan melalui keterlibatan masyarakat dalam memberikan bahan evaluasi melalui penilaian terhadap pemberian layanan dan tingkat integritas apparat penegak hukum dalam meberikan layanan kepada masyarakat pengguna layanan pengadilan. Berikut ini tujuan dari dilaksanakannya survei terhadap persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Negeri Sangatta.

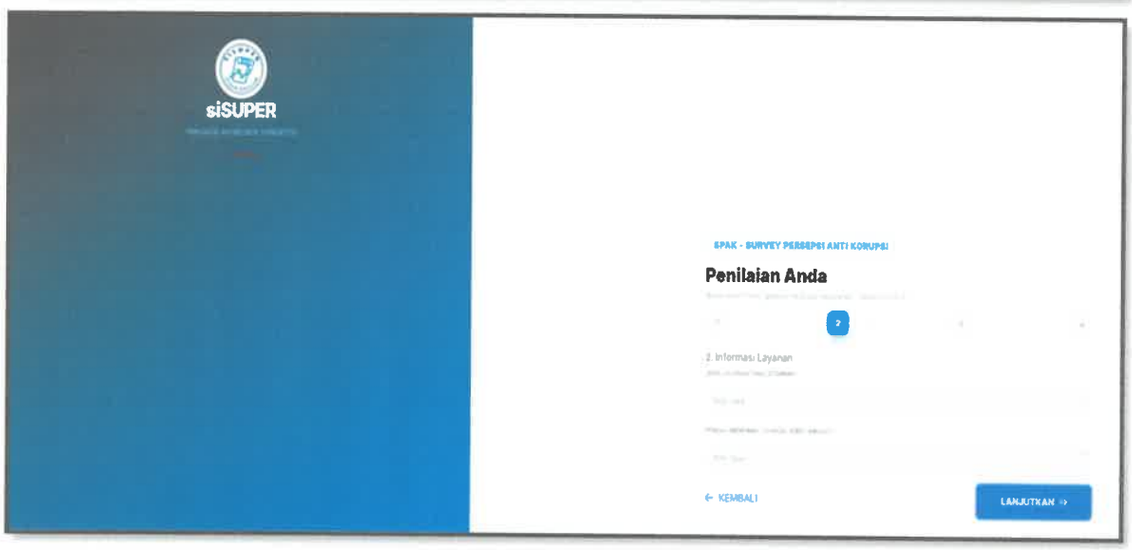
1) Untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap Anti Korupsi yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Sangatta secara objektif dan terukur.
2) Untuk memperoleh gambaran mengenai persepsi masyarakat terhadap integritas aparatur pengadilan serta efektivitas upaya pencegahan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pemberian layanan kepada masyarakat.
3) Untuk mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kualitas layanan.
4) Untuk menyediakan data dan informasi yang valid sebagai bahan evaluasi kinerja pelayanan publik dalam rangka mewujudkan pelayanan yang prima, transparan, dan akuntabel.
5) Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan melalui penyelenggaraan pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan dan harapan pengguna layanan.
6) Untuk menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan strategis dan langkah perbaikan berkelanjutan dalam peningkatan Anti Korupsi publik di Pengadilan Negeri Sangatta.

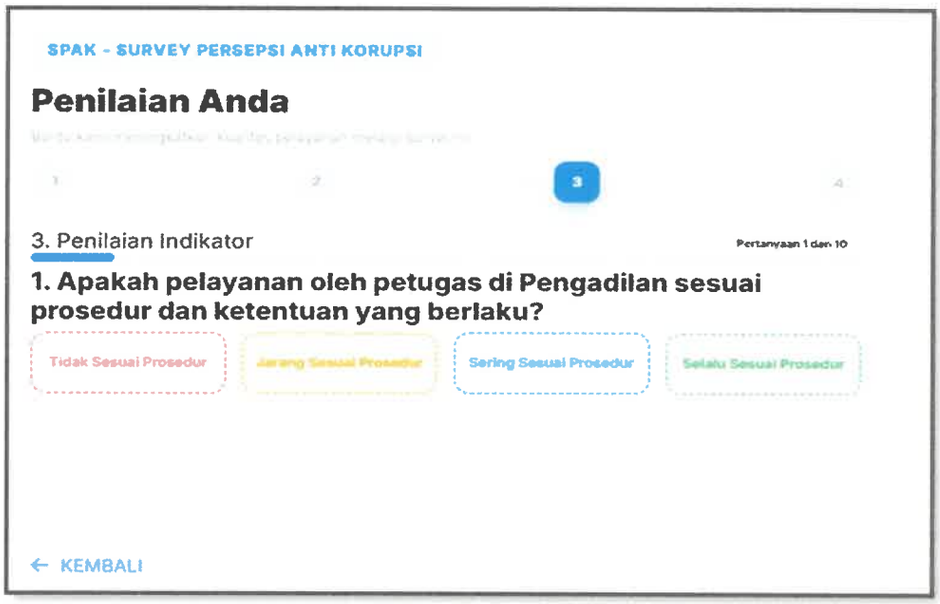
Berikut ini tampilan dari kuesioner survei mandiri yang dilakukan pada Pengadilan Negeri Sangatta melalui Aplikasi siSUPER

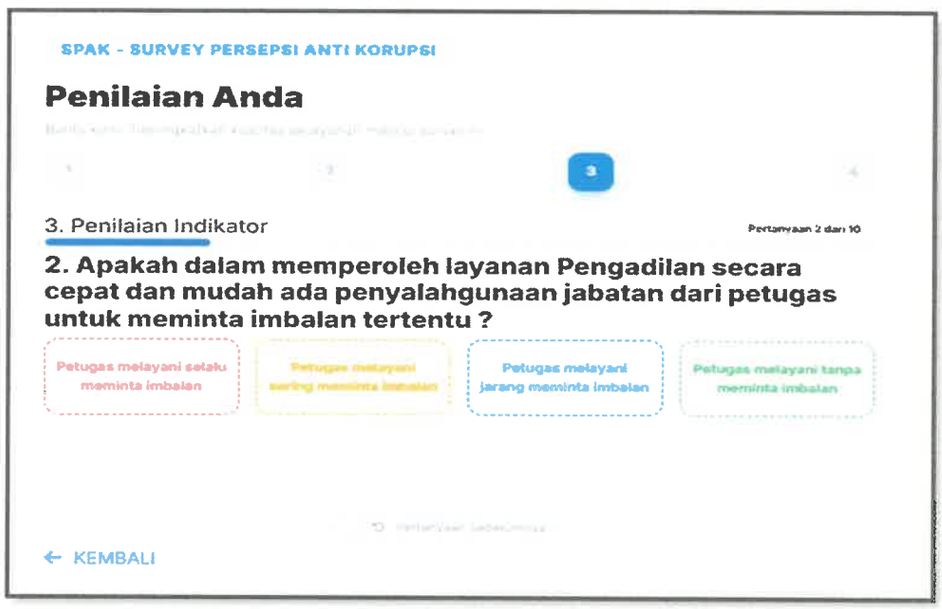


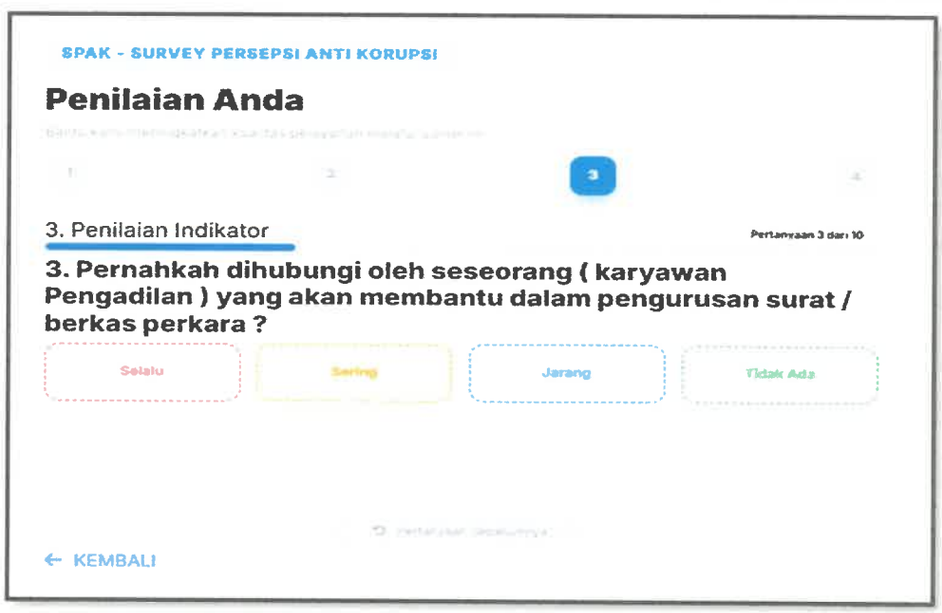
Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)

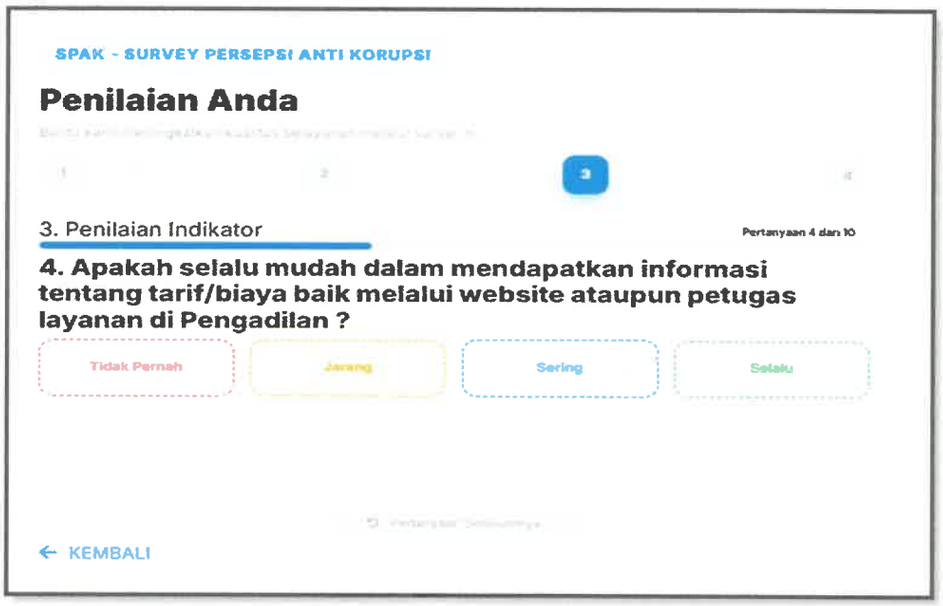


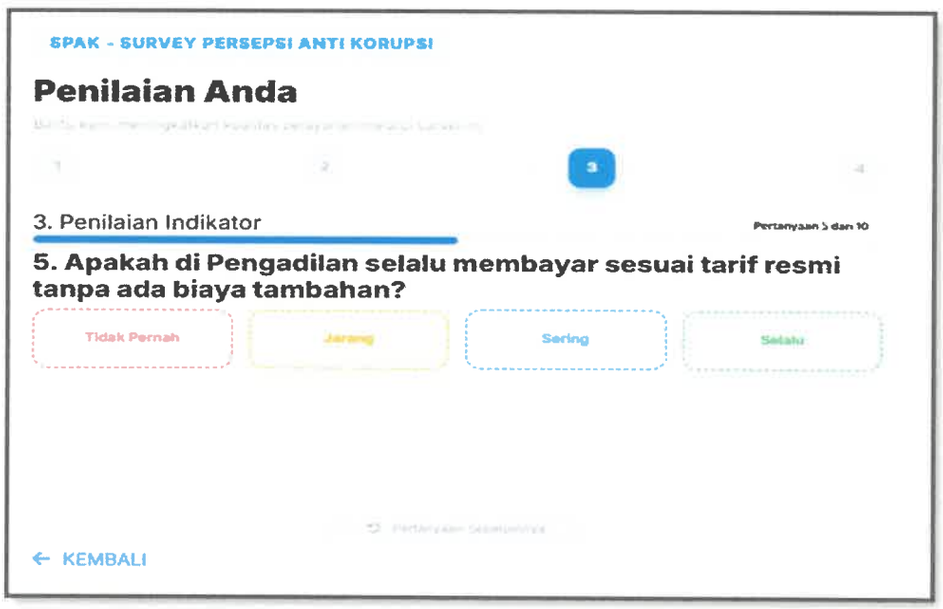


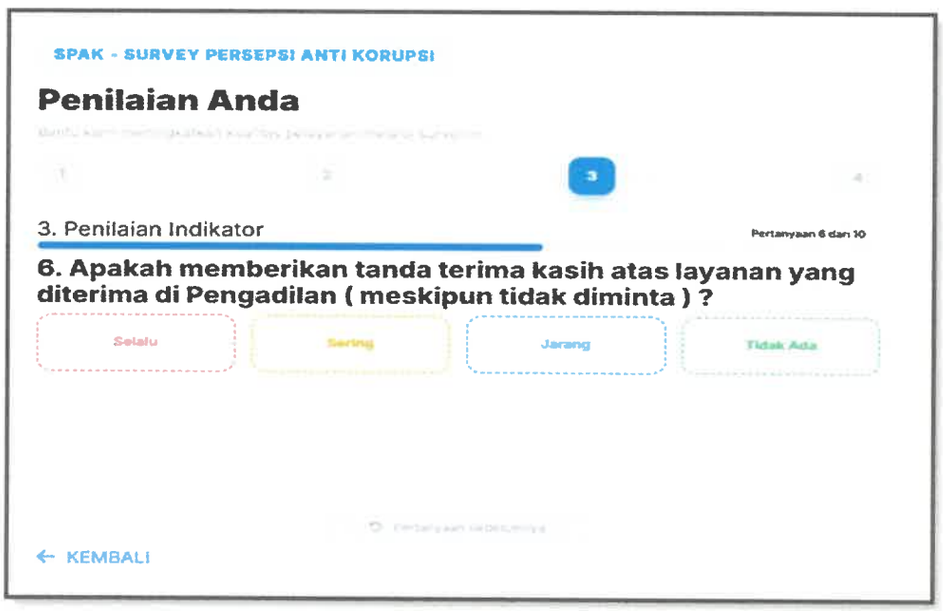

SPAK - SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
Penilaian Anda
3
3. Penilaian Indikator
Pertanyaan 1 dari 10
1. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?
Tidak Sesuai Prosedur
Jarang Sesuai Prosedur
Sering Sesuai Prosedur
Selalu Sesuai Prosedur
KEMBALI

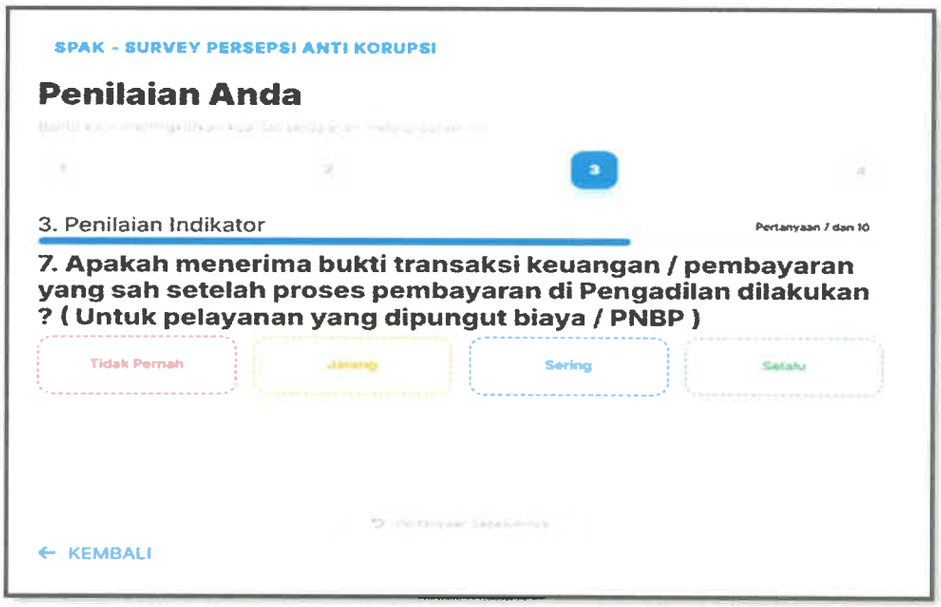

SPAK - SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
Penilaian Anda
3
3. Penilaian Indikator
Pertanyaan 2 dari 10
2. Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu ?
Petugas melayani selalu meminta imbalan
Petugas melayani sering meminta imbalan
Petugas melayani jarang meminta imbalan
Petugas melayani tanpa meminta imbalan
KEMBALI

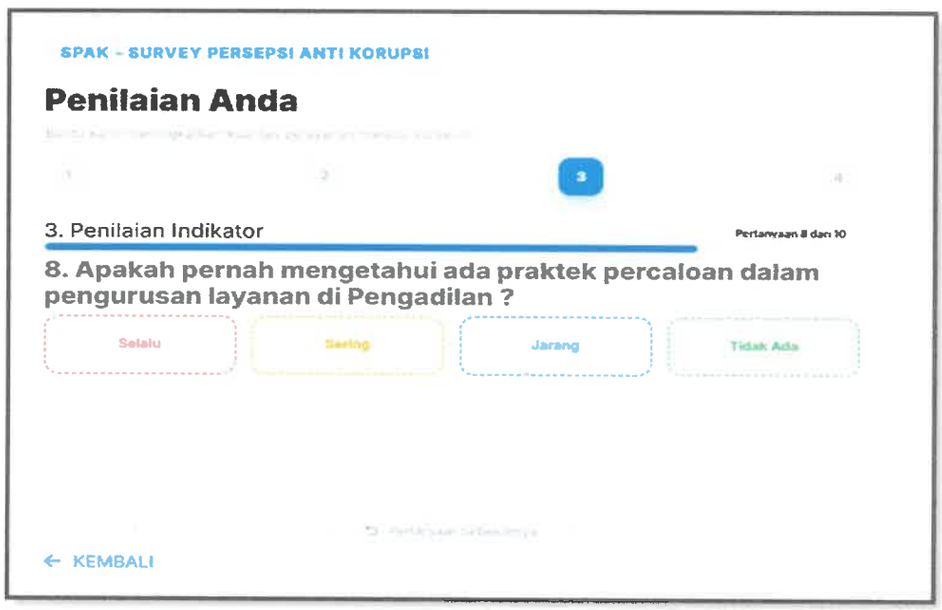

SPAK - SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
Penilaian Anda
3
3. Penilaian Indikator
Pertanyaan 3 dari 10
3. Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ?
Selalu
Sering
Jarang
Tidak Ada
KEMBALI

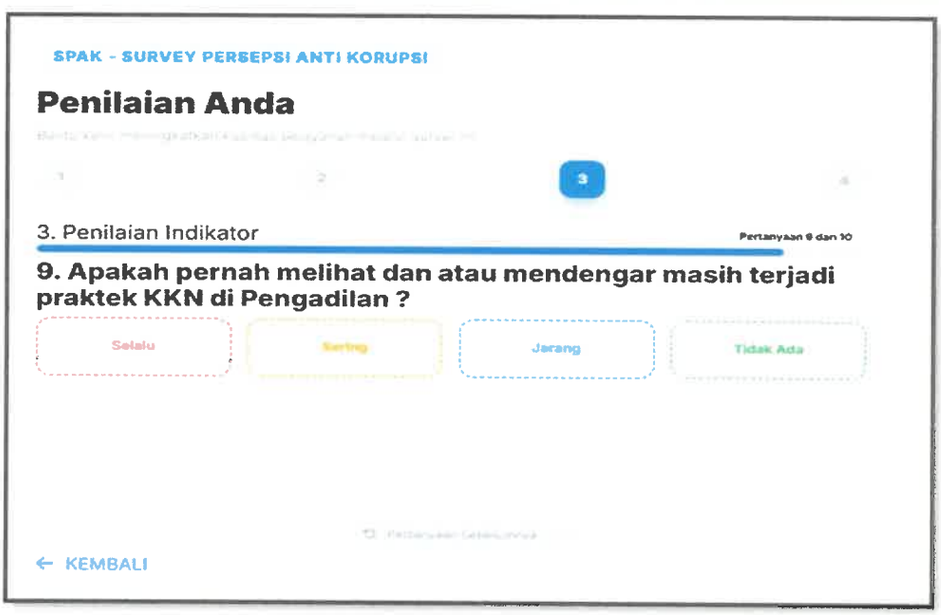

SPAK - SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
Penilaian Anda
3
3. Penilaian Indikator
Pertanyaan 4 dari 10
4. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ?
Tidak Pernah
Jarang
Sering
Selalu
KEMBALI

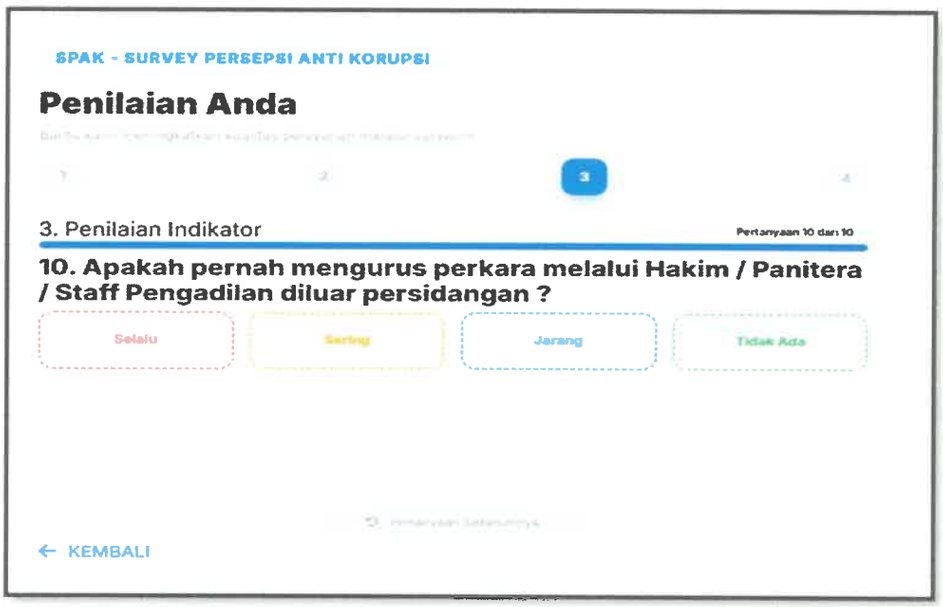

SPAK - SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
Penilaian Anda
3
3. Penilaian Indikator
Pertanyaan 5 dari 10
5. Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?
Tidak Pernah
Jarang
Sering
Selalu
KEMBALI

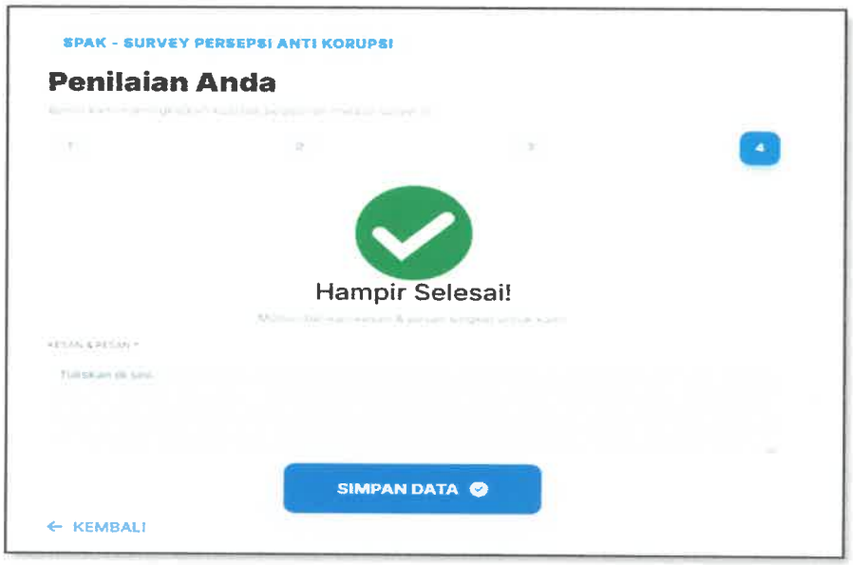

SPAK - SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
Penilaian Anda
3
3. Penilaian Indikator
Pertanyaan 6 dari 10
6. Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta) ?
Selalu
Sering
Jarang
Tidak Ada
KEMBALI


SPAK - SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
Penilaian Anda
3
3. Penilaian Indikator
Pertanyaan 7 dari 10
7. Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ? (Untuk pelayanan yang dipungut biaya / PNBP)
Tidak Pernah
Jarang
Sering
Selalu
KEMBALI


SPAK - SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
Penilaian Anda
3
3. Penilaian Indikator
Pertanyaan 8 dari 10
8. Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan ?
Selalu
Sering
Jarang
Tidak Ada
KEMBALI


SPAK - SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
Penilaian Anda
3
3. Penilaian Indikator
Pertanyaan 9 dari 10
9. Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan ?
Selalu
Sering
Jarang
Tidak Ada
KEMBALI


SPAK - SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
Penilaian Anda
3
3. Penilaian Indikator
Pertanyaan 10 dari 10
10. Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim / Panitera / Staff Pengadilan diluar persidangan ?
Selalu
Jarang
Tidak Ada
KEMBALI


SPAK - SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
Penilaian Anda
4
Hampir Selesai!
SIMPAN DATA
KEMBALI

BAB II
METODOLOGI SURVEI

A. KRITERIA RESPONDEN

Responden dalam survei ini adalah pengguna/penerima layanan di Pengadilan Negeri Sangatta dengan survei yang dilaksanakan melalui Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (siSUPER) pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan dibawahnya yang telah dibuat oleh Badilum untuk memudahkan masyakarat dalam memberi saran maupun masukan. Penerima layanan Pengadilan Negeri Sangatta dapat mengisi suvei tersebut secara *online,* sehingga survei tersebut tidak terikat pada tempat dan waktu tertentu dalam pengisiannya, dalam hal ini penerima layanan Pengadilan Negeri Sangatta dapat mengisi survei tersebut meskipun telah meninggalkan lokasi Pengadilan Negeri Sangatta.

Jumlah kuesioner (angket) yang terisi pada pelaksanaan **Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)** adalah **32 (tiga dua)** kuesioner (angket) dengan pengisian secara online. Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner tersebut, kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis objektivitas responden.

1) Umur

Responden Menurut Karakteristik Umur

No	Umur	Frekuensi (Orang)	Presentase (%)
1	18 - 28 Th	9	28,13%
2	29 - 39 Th	16	50,00%
3	40 - 49 Th	5	15,63%
4	50 - 59 Th	2	6,25%
5	60 - 69 Th	0	0%
Jumlah		**32**	**100%**

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik umur di atas, mayoritas responden pada survei ini berumur 29-39 tahun, yakni sebanyak 16 orang dengan presentase **50%.**

2) Jenis Kelamin

Responden Menurut Karakteristik Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi (Orang)	Presentase (%)
1	Laki-Laki	17	53%
2	Perempuan	15	47%
Jumlah		**32**	**100%**

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik jenis kelamin di atas mayoritas responden pada survei ini berjenis kelamin laki-laki, yakni sebanyak 17 orang dengan presentase **53%.**

3) Pendidikan

Responden Menurut Karakteristik Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan	Frekuensi (Orang)	Presentase (%)
1	Tidak/Belum Sekolah	1	3%
2	SD	0	0%
3	SMP	0	0%
4	SMU	10	31%
5	DIPLOMA 1	0	0%
6	DIPLOMA 2	0	0%
7	DIPLOMA 3	0	0%
8	S1	18	57%
9	S2	3	9%
10	S3	0	0%
Jumlah		**32**	**100%**

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik Pendidikan terakhir di atas, mayoritas responden pada survei ini berpendidikan terakhir S1, yakni sebanyak 18 orang dengan persentase **57%**.

4) Pekerjaan Utama

Responden Menurut Karakteristik Pekerjaan Utama

No	Pekerjaan	Frekuensi (Orang)	Presentase (%)
1	PNS	3	9%
2	TNI	0	0%
3	POLRI	1	3%
4	SWASTA	7	22%
5	WIRAUSAHA	0	0%
6	TENAGA KONTRAK	2	6%
7	LAINNYA	19	60%
Jumlah		**32**	**100%**

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik pekerjaan utama di atas, mayoritas responden pada survei ini berpekerjaan utama Lainnya, yakni sebanyak 19 orang dengan persentase **60%**.

B. METODE PENCACAHAN

Laporan penelitian terhadap hasil survei ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan Skala *Likert* yaitu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket) untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis pelayanan publik di mana responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Analisis data menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1-4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Kemudian data persepsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan Indeks Persepsi Anti Korupsi (SPAK) masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1) Menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini.
2) Mencari bobot rata-rata setiap indikator. Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 - 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100. Skala Indeks antara 1 - 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka Indeks Persepsi Anti Korupsi (SPAK) semakin baik.

C. METODE PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS

Dalam pelaksanaan survei, Tim Survei melalui beberapa tahapan seperti perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan dan penyajian hasil survei. Adapun tahapan tersebut mencakup langkah-langkah sebagai berikut:

1) Tim survei melakukan pengaturan pada aplikasi siSUPER Badilum untuk pengisian kuesioner.
2) Tim survei menginformasikan kepada pengunjung yang datang langsung ke Kantor Pengadilan Negeri Sanggatta untuk dapat mengisi kuesioner secara *online*, dan teknik penarikan sampel adalah dengan menggunakan metode *random sampling* melalui pengisian sendiri oleh responden.
3) Survei dilaksanakan setiap hari bagi pengguna layanan.
4) Petugas survei mengambil data yang telah diisi oleh responden dalam aplikasi siSUPER Badilum.
5) Tim survei menyajikan hasil analisa dalam bentuk analisis statistik deskriptif dan membuat laporan hasil survei.

Selanjutnya, data pada penelitian ini diambil dengan instrumen berupa kuesioner dengan pengisian sendiri oleh responden melalui Aplikasi siSUPER (Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik) dengan Variabel Pengukuran Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK). Variabel pada pengukuran **Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)** didasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah jo Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2026 tentang Syarat dan Teknik Pengusulan Unit Kerja/Satuan Kerja Menuju WBK/WBBM serta Pelaksanaan Survei Mandiri ZI Tahun 2026 yang terdiri dari 10 ruang lingkup, antara lain

1) Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
2) Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu.

3) Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara.
4) Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan.
5) Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan.
6) Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta).
7) Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan (Untuk pelayanan yang dipungut biaya / PNBP).
8) Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan.
9) Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan.
10) Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff Pengadilan diluar persidangan.

BAB III
PENGOLAHAN SURVEI

A. ANALISIS HASIL SURVEI

Analisis hasil data pada pengukuran **Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)** di Pengadilan Negeri Sangatta menggunakan analisis statistik deskriptif.

Sepuluh ruang lingkup **Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)** yang telah dijabarkan sebelumnya di atas, selanjutnya disusun ke dalam kuesioner yang terdiri dari 10 (sepuluh) item pertanyaan, dengan 4 (empat) jawaban. Adapun skor yang digunakan ialah menggunakan skala *likert,* dengan skor 1 sampai dengan 4. Analisis selanjutnya ialah mengkonversi ke dalam skala 100, dan kategorisasi informasi pelayanan di Pengadilan Negeri Sangatta ditentukan sebagai berikut:

Kategori Mutu Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit Pelayananya
1.	1,00 - 1,75	25,00 - 43,75	D	Tidak Baik
2.	1,76 - 2,50	43,76 - 62,50	C	Kurang Baik
3.	2,51 - 3,25	62,51 - 81,25	B	Baik
4.	3,26 - 4,00	81,26 - 100,00	A	Sangat Baik

Kuesioner yang terkumpul dan terisi dengan lengkap pada periode Triwulan II Tahun 2026 berdasarkan **Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)** adalah sejumlah **32 (tiga dua)** kuesioner dan hasil analisis data yang telah dilakukan diketahui bahwa **Indeks Persepsi Anti Korupsi (SPAK)** pada Pengadilan Negeri Sangatta adalah sebesar **4,00/100,00%** yakni berada pada kategori "**SANGAT BAIK**" (pada interval 81,26 - 100,00). Adapun analisis data yang dilakukan dengan kategori sebagai berikut:

a) Manipulasi Peraturan

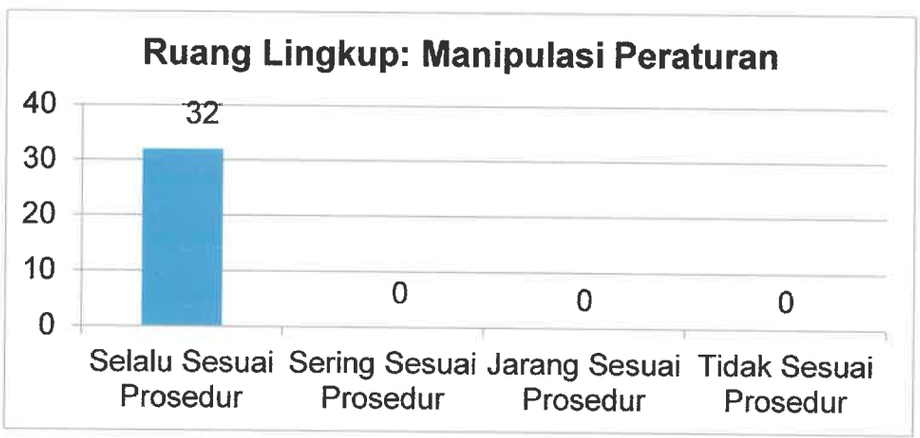
Ruang lingkup "manipulasi peraturan" bertujuan untuk melihat apakah pelayanan yang diberikan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, tanpa adanya penyimpangan, perubahan, atau manipulasi dalam penerapan aturan yang dapat memengaruhi proses maupun hasil pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh **rata-rata skor sebesar 4,000** berada pada interval skor 3,26 – 4,000 dengan **kategori "Sangat Baik"**. Dengan demikian, kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan terhadap penerapan peraturan dalam penyelenggaraan pelayanan berada pada kategori sangat baik. Adapun hasil jawaban kuesioner mengenai Manipulasi Peraturan disajikan pada tabel berikut ini:

Survei Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Sangatta
Ruang Lingkup : Manipulasi Peraturan

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			Orang	%
1	Selalu sesuai prosedur	4	32	100%
2	Sering sesuai prosedur	3	0	0%
3	Jarang sesuai prosedur	2	0	0%
4	Tidak sesuai prosedur	1	0	0%
Jumlah			**32**	**100%**

Berdasarkan table diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

Survei Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Sangatta
Ruang Lingkup: Manipulasi Peraturan





b) Penyalahgunaan Jabatan

Ruang lingkup "penyalahgunaan jabatan pada unit layanan ini" bertujuan untuk melihat apakah dalam penyelenggaraan pelayanan tidak terdapat penyalahgunaan jabatan oleh petugas, baik untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun memberikan perlakuan khusus yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penilaian ini juga bertujuan untuk mengetahui tingkat kepercayaan masyarakat terhadap integritas aparatur dalam memberikan pelayanan secara profesional, adil, dan akuntabel. Dari hasil analisis diperoleh **rata-rata skor sebesar 4,000** berada pada interval skor 3,26 – 4,000 dengan **kategori "Sangat Baik"**. Dengan demikian, kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan terhadap aspek penyalahgunaan jabatan berada pada kategori sangat baik. Adapun hasil jawaban kuesioner mengenai penyalahgunaan jabatan pada unit layanan ini disajikan pada tabel berikut ini:

Survei Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Sangatta
Ruang Lingkup: Penyalahgunaan Jabatan

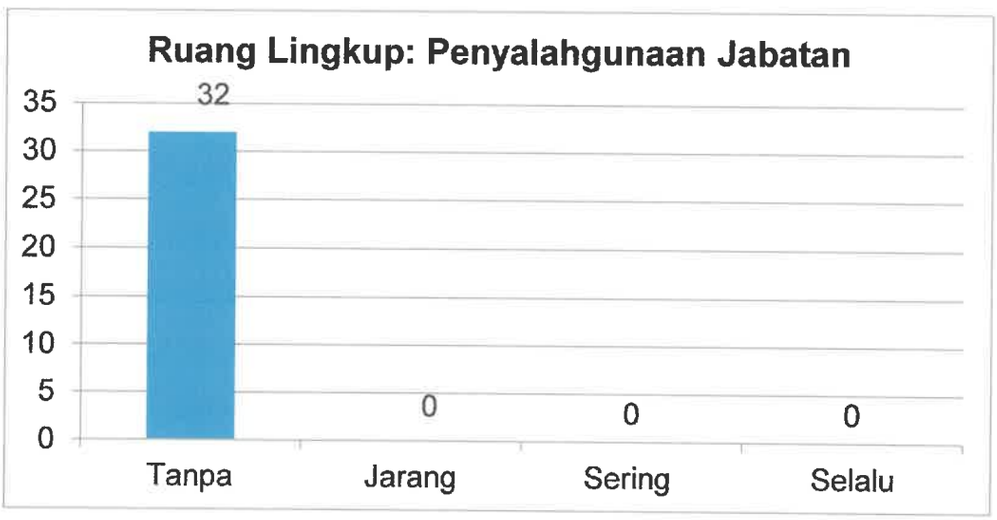
No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			Orang	%
1	Petugas melayani tanpa meminta imbalan	4	32	100%
2	Petugas melayani jarang meminta imbalan	3	0	0%
3	Petugas melayani sering meminta imbalan	2	0	0%

4	Petugas melayani selalu meminta imbalan	1	0	0%
Jumlah			**32**	**100%**

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

Survei Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Sangatta

Ruang Lingkup: Penyalahgunaan Jabatan





c) **Menjual Pengaruh**

Ruang lingkup "menjual pengaruh pada unit layanan ini" bertujuan untuk mengetahui apakah dalam penyelenggaraan pelayanan di pengadilan tidak terdapat praktik memanfaatkan jabatan, kewenangan, hubungan, atau pengaruh tertentu untuk memberikan kemudahan, perlakuan istimewa, maupun keuntungan kepada pihak tertentu yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Penilaian ini juga bertujuan untuk mengukur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap integritas aparatur dalam memberikan pelayanan yang profesional, adil, transparan, dan bebas dari praktik menjual pengaruh. Dari hasil analisis diperoleh **rata-rata skor sebesar 4,000** berada pada interval skor 3,26 – 4,000 dengan **kategori "Sangat Baik"**. Dengan demikian, persepsi masyarakat terhadap aspek menjual pengaruh pada pelayanan pengadilan berada pada kategori sangat baik. Adapun hasil jawaban kuesioner mengenai menjual pengaruh disajikan pada tabel berikut ini:

Survei Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Sangatta

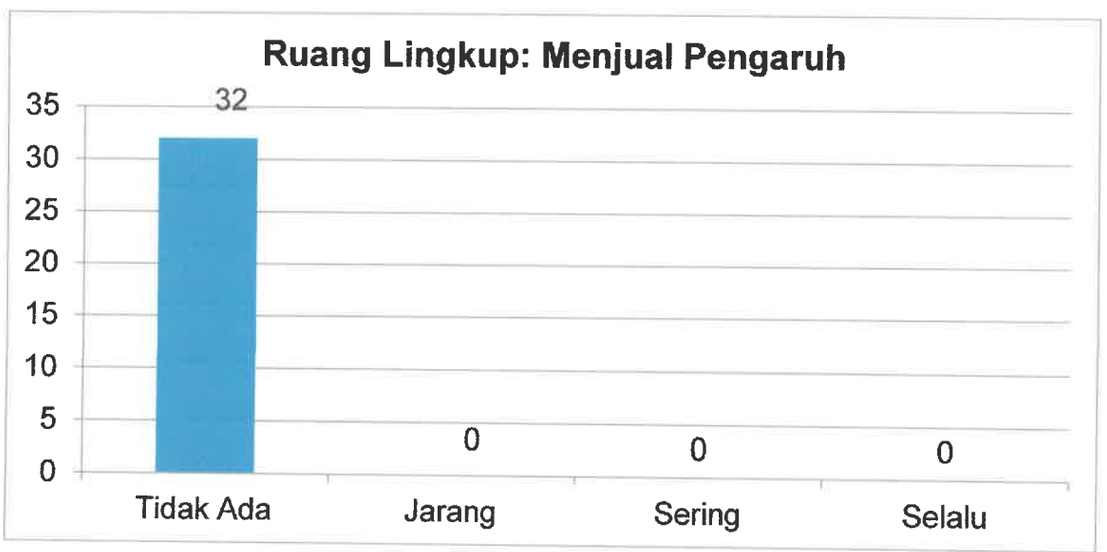
Ruang Lingkup : Menjual Pengaruh

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			Orang	%
1	Tidak Ada	4	32	100%
2	Jarang	3	0	0%
3	Sering	2	0	0%
4	Selalu	1	0	0%
Jumlah			**32**	**100%**

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

Survei Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Sangatta

Ruang Lingkup: Menjual Pengaruh





d) Transparansi Biaya

Ruang lingkup "transparansi biaya yang ditetapkan pengadilan mudah untuk diikuti" bertujuan untuk mengukur sejauh mana informasi mengenai biaya layanan yang ditetapkan oleh pengadilan disampaikan secara jelas, mudah dipahami, serta mudah diikuti oleh masyarakat pengguna layanan. Penilaian juga mencakup kesesuaian antara informasi biaya yang dipublikasikan dengan penerapannya dalam proses pelayanan. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai **rata-rata skor sebesar 4,000** yang berada pada interval 3,26 – 4,000 dengan **kategori "Sangat Baik"**. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap transparansi biaya yang ditetapkan oleh pengadilan berada pada kategori sangat baik. Adapun hasil jawaban kuesioner mengenai transparansi biaya yang ditetapkan pengadilan disajikan pada tabel berikut.

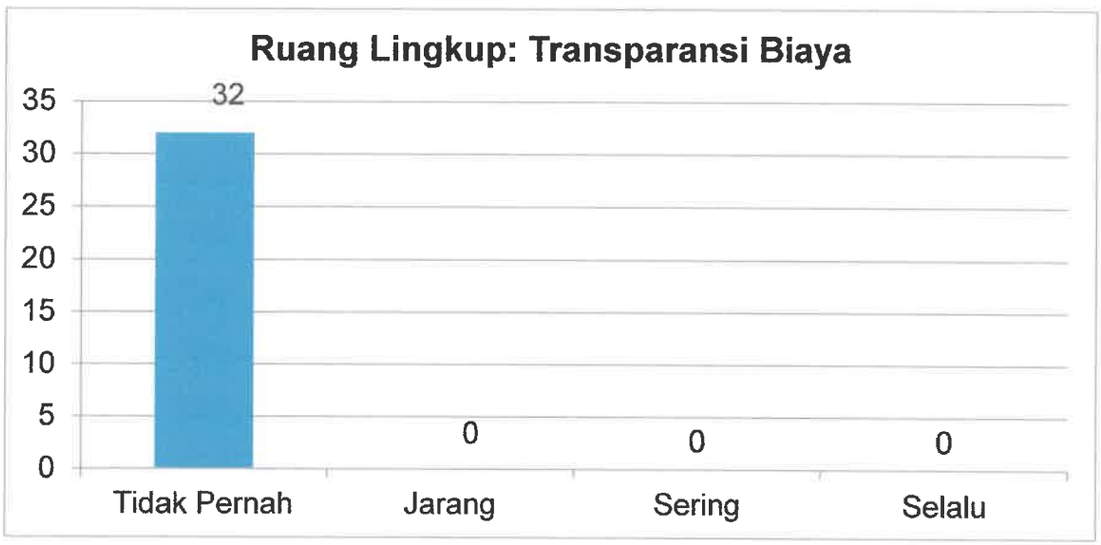
Survei Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Sangatta
Ruang Lingkup : Transparansi Biaya

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			Orang	%
1	Tidak Pernah	4	32	100%
2	Jarang	3	0	0%
3	Sering	2	0	0%
4	Selalu	1	0	0%
Jumlah			**32**	**100%**

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

Survei Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Sangatta

Ruang Lingkup: Transparansi Biaya



Survei Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Sangatta

Ruang Lingkup: Transparansi Biaya



e) Biaya Tambahan

Ruang lingkup "biaya tambahan" bertujuan untuk mengukur sejauh mana pelayanan yang diberikan bebas dari pungutan atau biaya di luar ketentuan yang telah ditetapkan. Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui apakah masyarakat memperoleh pelayanan tanpa adanya biaya tambahan yang tidak semestinya, sehingga proses pelayanan berlangsung secara transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai **rata-rata skor sebesar**

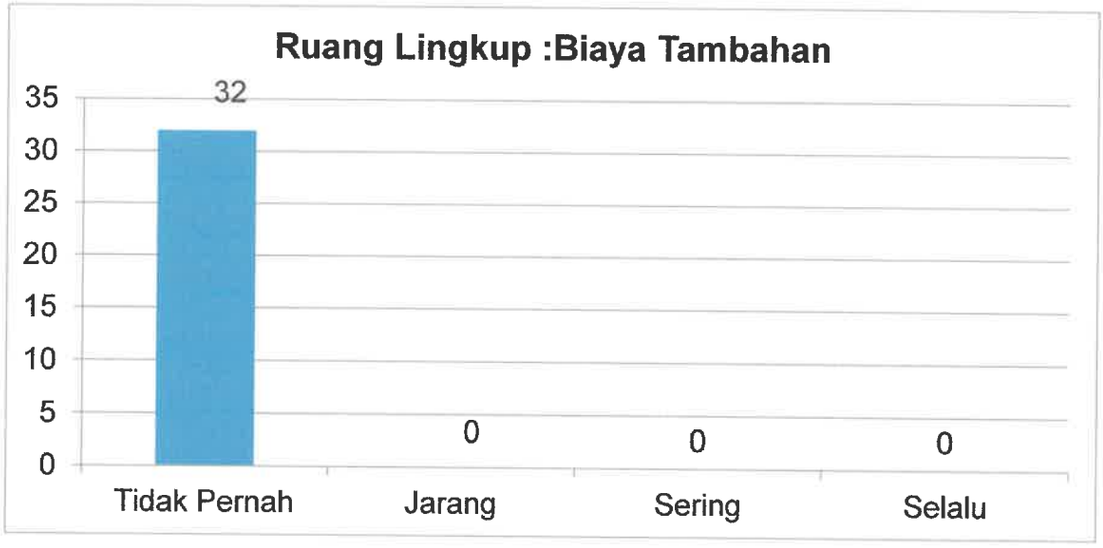
4,000 yang berada pada interval skor 3,26–4,000 dengan **kategori "Sangat Baik"**. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan terhadap aspek biaya tambahan berada pada kategori sangat baik. Adapun hasil jawaban kuesioner mengenai biaya tambahan disajikan pada tabel berikut.

Survei Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Sangatta
Ruang Lingkup : Biaya Tambahan

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			Orang	%
1	Tidak Pernah	4	32	100%
2	Jarang	3	0	0%
3	Sering	2	0	0%
4	Selalu	1	0	0%
Jumlah			**32**	**100%**

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

Survei Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Sangatta
Ruang Lingkup: Biaya Tambahan



Survei Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Sangatta

Ruang Lingkup: Biaya Tambahan



f) Hadiah

Ruang lingkup "hadiah yang ditetapkan unit layanan ini" bertujuan untuk mengukur sejauh mana penyelenggaraan pelayanan di unit layanan terbebas dari praktik pemberian hadiah, gratifikasi, atau bentuk pemberian lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan. Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui apakah masyarakat dapat memperoleh pelayanan tanpa adanya harapan atau permintaan pemberian hadiah kepada petugas, sehingga pelayanan berlangsung secara profesional, berintegritas, dan sesuai dengan prinsip pelayanan publik. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai **rata-rata skor sebesar 4,000**, yang berada pada interval skor 3,26–4,000 dengan **kategori "Sangat Baik".** Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan terhadap aspek hadiah yang ditetapkan unit layanan ini berada pada kategori sangat baik. Adapun hasil jawaban kuesioner mengenai hadiah yang ditetapkan unit layanan ini disajikan pada tabel berikut.

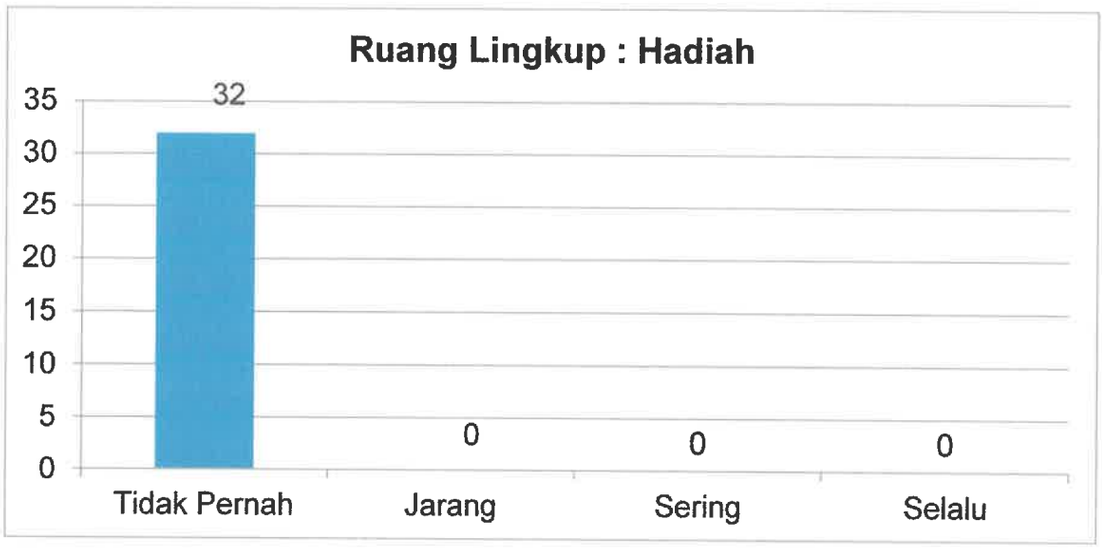
Survei Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Sangatta
Ruang Lingkup : Hadiah

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			Orang	%
1	Tidak Pernah	4	32	100%
2	Jarang	3	0	0%
3	Sering	2	0	0%
4	Selalu	1	0	0%
Jumlah			**32**	**100%**

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

Survei Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Sangatta

Ruang Lingkup: Hadiah



Survei Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Sangatta

Ruang Lingkup: Hadiah



g) Transparansi Pembayaran

Ruang lingkup "transparansi pembayaran yang ditetapkan unit layanan ini" bertujuan untuk mengukur sejauh mana informasi mengenai pembayaran atau biaya layanan yang ditetapkan oleh unit layanan disampaikan secara terbuka, jelas, mudah dipahami, dan mudah diakses oleh masyarakat. Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui apakah masyarakat memperoleh informasi yang lengkap mengenai besaran, mekanisme, dan tata cara pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga proses pembayaran dapat dilakukan secara transparan, akuntabel, dan terhindar dari pungutan yang tidak semestinya. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai **rata-rata skor sebesar 4,000**, yang berada pada interval skor 3,26–4,000 dengan **kategori "Sangat Baik".** Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan terhadap aspek transparansi pembayaran yang ditetapkan unit layanan ini berada pada kategori sangat baik. Adapun hasil jawaban kuesioner mengenai aspek transparansi pembayaran yang ditetapkan unit layanan ini disajikan pada tabel berikut.

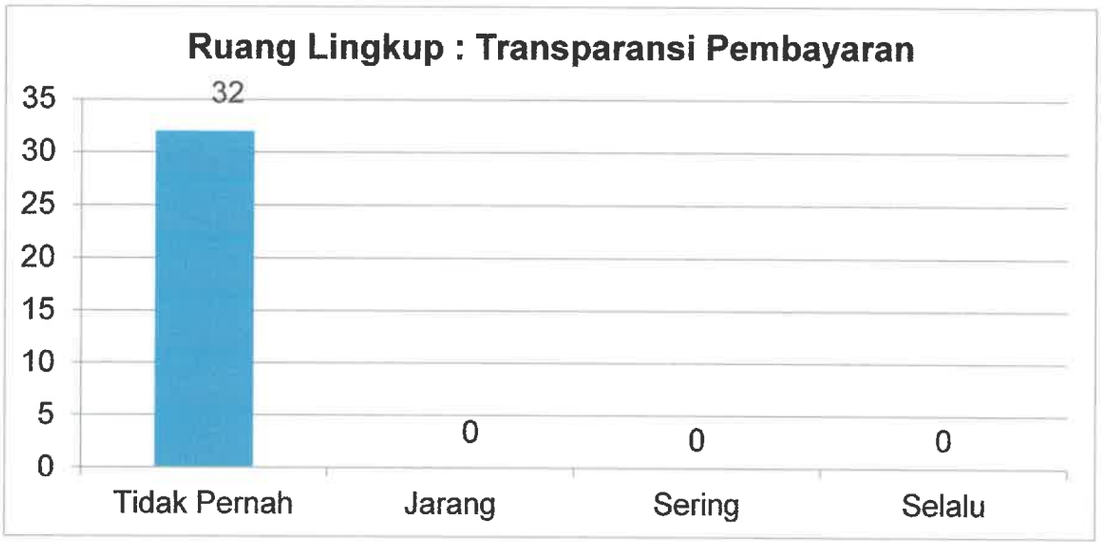
Survei Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Sangatta
Ruang Lingkup : Transparansi Pembayaran

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			Orang	%
1	Selalu	4	32	100%
2	Sering	3	0	0%
3	Jarang	2	0	0%
4	Tidak Pernah	1	0	0%
Jumlah			**32**	**100%**

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

Survei Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Sangatta

Ruang Lingkup: Transparansi Pembayaran





h) Percaloan

Ruang lingkup "percaloan yang ditetapkan unit layanan ini" bertujuan untuk mengukur sejauh mana pelayanan di unit layanan terbebas dari praktik percaloan, yaitu keterlibatan pihak perantara yang tidak resmi dalam proses pelayanan. Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui apakah masyarakat memperoleh layanan secara langsung melalui prosedur yang telah ditetapkan tanpa adanya perantara yang menawarkan percepatan atau kemudahan tidak resmi, sehingga pelayanan dapat berlangsung secara transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai **rata-rata skor sebesar 4,000**, yang berada pada interval skor 3,26–4,000 dengan **kategori "Sangat Baik".** Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat pengguna

layanan pengadilan terhadap aspek percaloan yang ditetapkan unit layanan ini berada pada kategori sangat baik. Adapun hasil jawaban kuesioner mengenai aspek percaloan yang ditetapkan unit layanan ini disajikan pada tabel berikut.

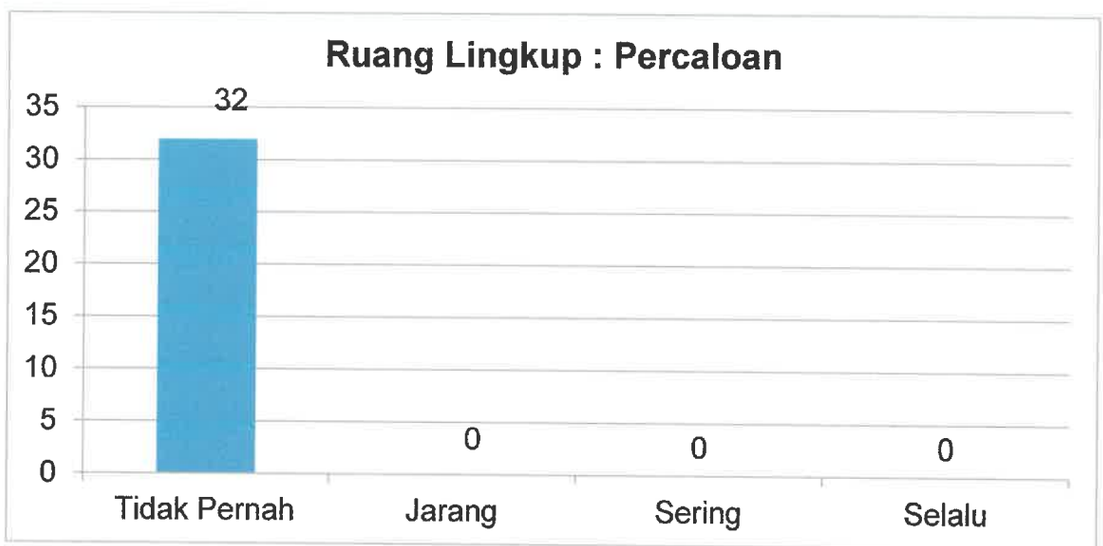
Survei Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Sangatta
Ruang Lingkup : Percaloan

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			Orang	%
1	Tidak Pernah	4	32	100%
2	Jarang	3	0	0%
3	Sering	2	0	0%
4	Selalu	1	0	0%
Jumlah			**32**	**100%**

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

Survei Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Sangatta

Ruang Lingkup: Percaloan





i) **Perbuatan Curang**

Ruang lingkup "perbuatan curang yang ditetapkan unit layanan ini" bertujuan untuk mengukur sejauh mana penyelenggaraan pelayanan di unit layanan terbebas dari praktik perbuatan curang, seperti manipulasi prosedur, penyalahgunaan kewenangan, maupun tindakan tidak jujur lainnya yang dapat memengaruhi proses maupun hasil pelayanan. Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui apakah masyarakat memperoleh layanan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan tanpa adanya kecurangan dalam bentuk apa pun, sehingga pelayanan dapat berlangsung secara transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai **rata-rata skor sebesar 4,000,** yang berada pada interval skor 3,26 – 4,000 dengan **kategori "Sangat Baik".** Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan terhadap aspek perbuatan curang yang ditetapkan unit layanan ini berada pada kategori sangat baik. Adapun hasil jawaban kuesioner mengenai aspek perbuatan curang yang ditetapkan unit layanan ini disajikan pada tabel berikut.

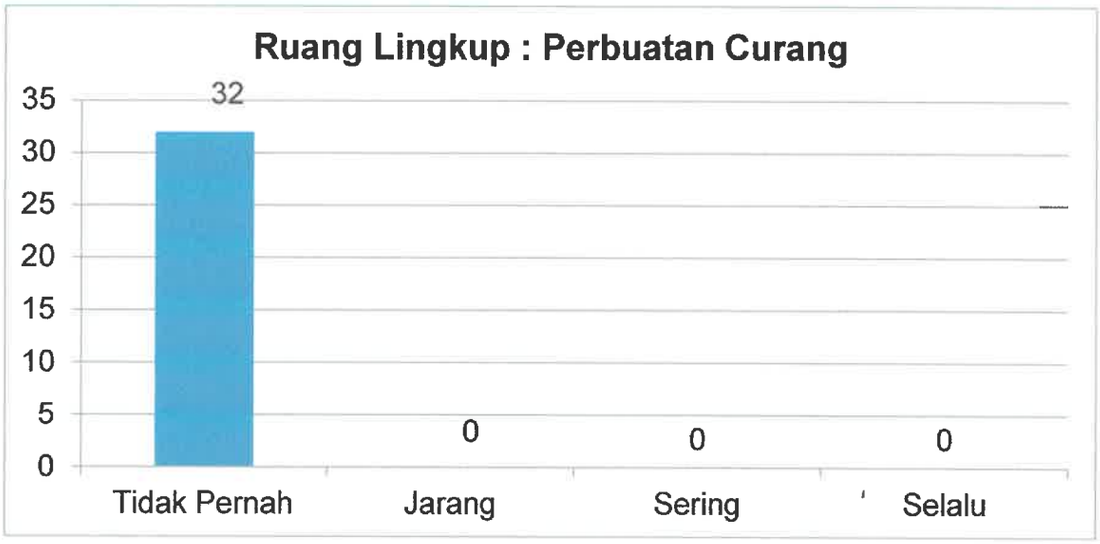
Survei Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Sangatta
Ruang Lingkup : Perbuatan Curang

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			Orang	%
1	Tidak Pernah	4	32	100%
2	Jarang	3	0	0%
3	Sering	2	0	0%
4	Selalu	1	0	0%
Jumlah			**32**	**100%**

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

Survei Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Sangatta

Ruang Lingkup: Perbuatan Curang





j) Transaksi Rahasia

Ruang lingkup "transaksi rahasia yang ditetapkan unit layanan ini" bertujuan untuk mengukur sejauh mana penyelenggaraan pelayanan di unit layanan terbebas dari praktik transaksi tidak resmi atau tersembunyi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui apakah masyarakat memperoleh layanan secara terbuka dan transparan tanpa adanya transaksi di luar prosedur resmi, sehingga pelayanan dapat berlangsung secara akuntabel, adil, dan sesuai dengan prinsip keterbukaan. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai **rata-rata skor sebesar 4,000**, yang berada pada interval skor 3,26 – 4,000 dengan **kategori "Sangat Baik".** Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan terhadap aspek transaksi rahasia yang ditetapkan unit layanan ini berada

pada kategori sangat baik. Adapun hasil jawaban kuesioner mengenai aspek transaksi rahasia yang ditetapkan unit layanan ini disajikan pada tabel berikut.

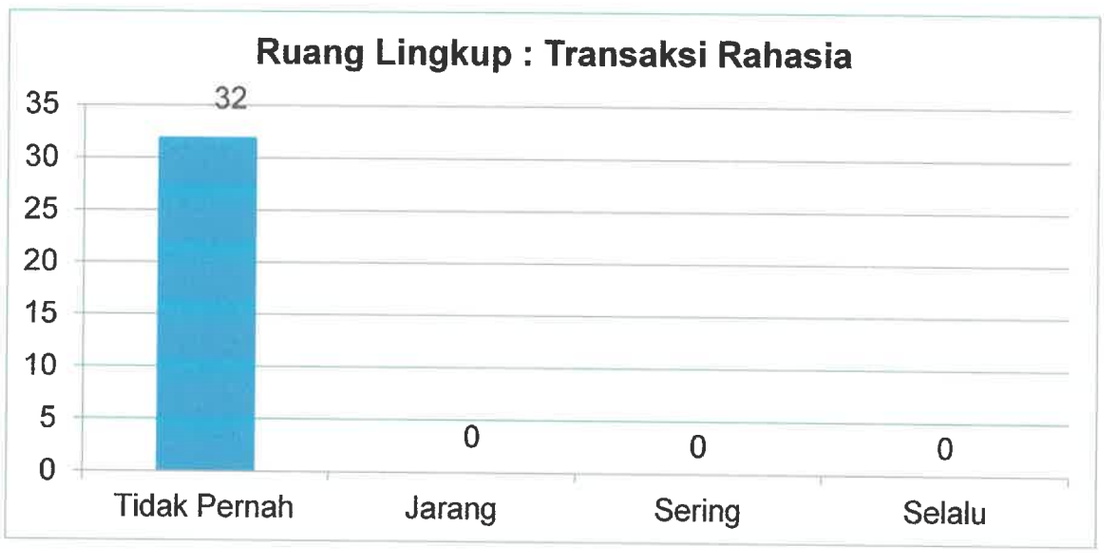
Survei Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Sangatta
Ruang Lingkup : Transaksi Rahasia

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			Orang	%
1	Tidak Pernah	4	32	100%
2	Jarang	3	0	0%
3	Sering	2	0	0%
4	Selalu	1	0	0%
Jumlah			**32**	**100%**

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

Survei Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Sangatta

Ruang Lingkup: Transaksi Rahasia





B. TINDAK LANJUT HASIL SURVEI

Dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan **Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)** dari aplikasi siSUPER Badilum terhadap Pelayanan di Pengadilan Negeri Sangatta periode Triwulan III Tahun 2026, dapat disimpulkan bahwa nilai terendah terdapat pada 3 (tiga) unsur, yaitu unsur **transparansi pembayaran, percaloan** dan **perbuatan curang.**

Terhadap 3 (tiga) unsur terendah di atas kemudian dilakukan tindak lanjut sebagai bentuk evaluasi dan perbaikan terhadap Anti Korupsi di Pengadilan Negeri Sangatta, tindak lanjut tersebut antara lain:

1) Terhadap ruang lingkup **transparansi pembayaran** dengan skor 4,000, pada titik ukur pelayanan (mutu pelayanan) berdasarkan hasil analisis masih berada pada interval skor 3,26–4,000 dengan kategori "Sangat Baik". Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut, perlu dilakukan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas transparansi pembayaran melalui penguatan keterbukaan informasi terkait biaya layanan, kemudahan akses informasi pembayaran, serta evaluasi secara berkala. Selain itu, dilakukan briefing secara rutin kepada petugas PTSP guna memperkuat komitmen dalam memberikan informasi biaya layanan secara jelas dan transparan serta memastikan seluruh pembayaran sesuai dengan tarif resmi yang telah ditetapkan.
2) Terhadap ruang lingkup dengan skor **percaloan** 4,000 serta pada titik ukur pelayanan (mutu pelayanan) Dirjen Badilum yang masih berada pada interval 3,26–4,000 dengan kategori "Sangat Baik", maka sebagai tindak lanjut Pengadilan Negeri Sangatta akan memperkuat penyampaian informasi kepada masyarakat terkait mekanisme pelayanan, persyaratan, dan tarif resmi melalui berbagai sarana informasi yang tersedia, meningkatkan optimalisasi pelayanan pada PTSP, serta memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan di lingkungan pengadilan. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mencegah terjadinya praktik percaloan dan memastikan masyarakat memperoleh pelayanan secara langsung, mudah, transparan, serta sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan tanpa melalui pihak perantara.
3) Terhadap ruang lingkup **perbuatan curang** dengan skor 4,000, serta pada titik ukur pelayanan (mutu pelayanan) Dirjen Badilum berdasarkan hasil analisis masih berada pada interval skor 3,26–4,000 dengan kategori "Sangat Baik". Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut, Pengadilan Negeri

Sangatta akan memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan, meningkatkan briefing dan penguatan integritas kepada petugas PTSP, serta memastikan seluruh proses pelayanan dilaksanakan sesuai prosedur, transparan, dan tanpa adanya manipulasi atau penyimpangan.

BAB IV
DATA SURVEI

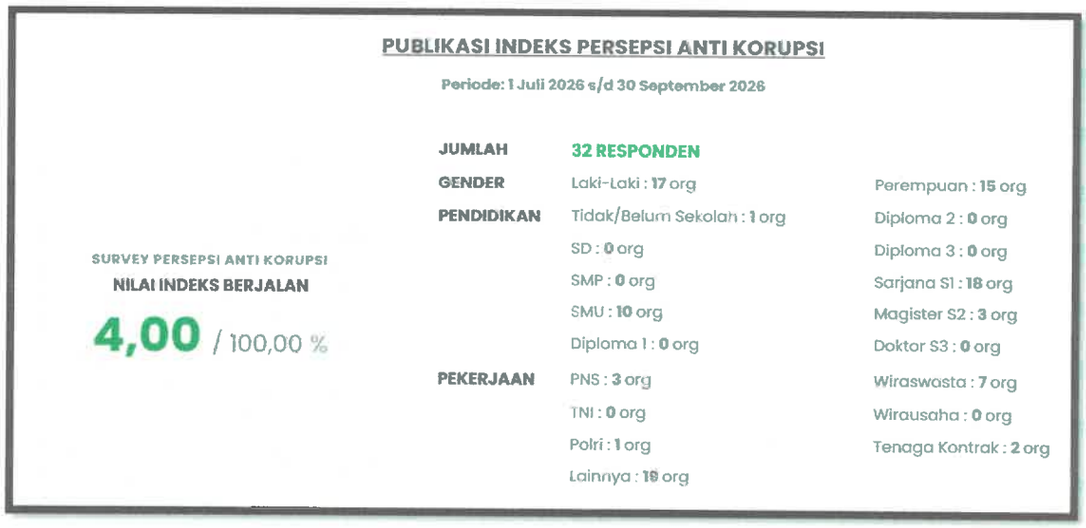
A. DATA RESPONDEN

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
SATKER: PENGADILAN NEGERI SANGATTA | Triwulan 3 2026

No	Responden	Demografi	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	Waktu
1	Khoirul Arifin HP : 08125809822	45 Th | Laki-lakiLayanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	29 September 2026
2	Achmad Saifullah HP : 081349886116	26 Th | Laki-lakiLayanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	24 September 2026
3	Deby Rezky HP : 085249307110	26 Th | PerempuanLayanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	22 September 2026
4	Shabariah HP : 081345785756	41 Th | PerempuanLayanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	22 September 2026
5	Umi Ulfa Azizah HP : 082351495751	26 Th | PerempuanLayanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	22 September 2026
6	Halna Sus HP : 081243000648	52 Th | PerempuanLayanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	21 September 2026
7	Febrianti Ramadhani HP : 085138856287	31 Th | PerempuanLayanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	21 September 2026
8	Armah HP : 081310171394	26 Th | PerempuanLayanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	21 September 2026
9	Hendrianto HP : 082141320152	31 Th | Laki-lakiLayanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3 September 2026
10	Sahat HP : 081289786954	27 Th | Laki-lakiLayanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3 September 2026
11	Rezki Febrianti HP : 081212263942	25 Th | PerempuanLayanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3 September 2026
12	Erni HP : 085822360655	36 Th | PerempuanLayanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3 September 2026
13	Rethy Ida Harwita HP : 081350005525	39 Th | PerempuanLayanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2 September 2026
14	Chandra Ferma Irawan HP : 082213591971	34 Th | Laki-lakiLayanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2 September 2026
15	Sukman HP : 082335439078	26 Th | Laki-lakiLayanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	28 Agustus 2026
16	Sterrly S HP : 081242011008	35 Th | Laki-lakiLayanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	28 Agustus 2026
17	Hutri Dinmas HP : 081216932860	30 Th | Laki-lakiLayanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	28 Agustus 2026
18	Akhmad Darjat HP : 081263555279	45 Th | Laki-lakiLayanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	19 Agustus 2026
19	Albert HP : 082154221767	38 Th | Laki-lakiLayanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	19 Agustus 2026
20	Husniyah HP : 082254846905	39 Th | PerempuanLayanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	19 Agustus 2026
21	Miftahul Nisa HP : 082196826968	25 Th | PerempuanLayanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	30 Juli 2026
22	Nur Azizah Batan HP : 082350619371	24 Th | PerempuanLayanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	30 Juli 2026
23	Sirajudin Takeama HP : 082312141352	32 Th | Laki-lakiLayanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	28 Juli 2026
24	Nadya Sari HP : 082375685978	29 Th | PerempuanLayanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	27 Juli 2026
25	Firman Afriza HP : 085252831891	29 Th | Laki-lakiLayanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	27 Juli 2026
26	Fitri Yani HP : 082250854723	34 Th | PerempuanLayanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	27 Juli 2026
27	Muhammad Nas HP : 082234941519	42 Th | Laki-lakiLayanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	20 Juli 2026
28	Darussalam HP : 082152914919	42 Th | Laki-lakiLayanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	20 Juli 2026
29	Arianto HP : 08152145562	59 Th | Laki-lakiLayanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	14 Juli 2026
30	Dervius Iwan HP : 082254379042	35 Th | Laki-lakiLayanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	13 Juli 2026
31	Sarif Pandurata HP : 082193371601	35 Th | Laki-lakiLayanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	10 Juli 2026
32	Mita Puspa HP : 081808018560	36 Th | PerempuanLayanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	10 Juli 2026

B. DATA DUKUNG LAINNYA

- **HASIL SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK) PADA APLIKASI siSUPER**



PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

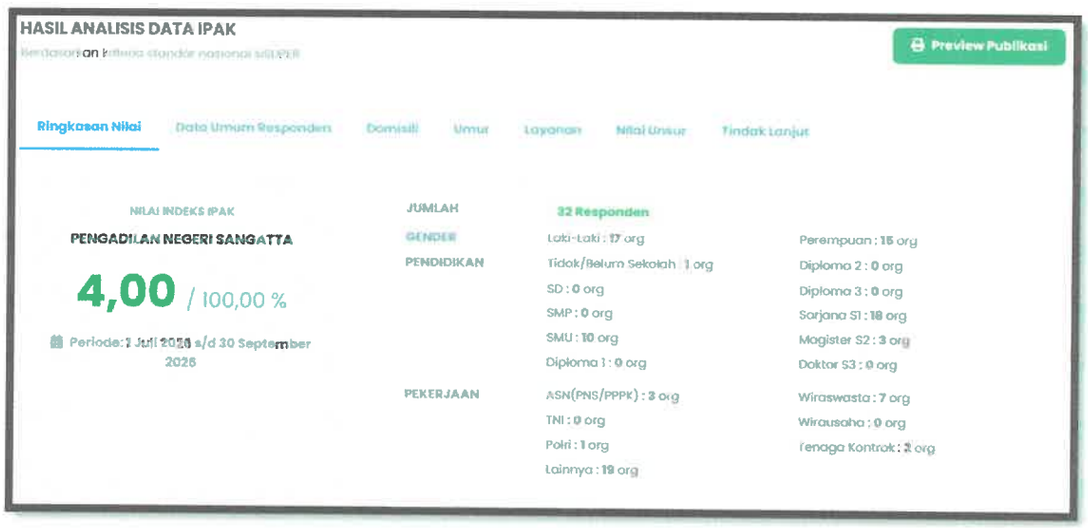
Periode: 1 Juli 2026 s/d 30 September 2026

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

NILAI INDEKS BERJALAN

4,00 / 100,00 %

JUMLAH	**32 RESPONDEN**	
GENDER	Laki-Laki : **17** org	Perempuan : **15** org
PENDIDIKAN	Tidak/Belum Sekolah : **1** org	Diploma 2 : **0** org
	SD : **0** org	Diploma 3 : **0** org
	SMP : **0** org	Sarjana S1 : **18** org
	SMU : **10** org	Magister S2 : **3** org
	Diploma 1 : **0** org	Doktor S3 : **0** org
PEKERJAAN	PNS : **3** org	Wiraswasta : **7** org
	TNI : **0** org	Wirausaha : **0** org
	Polri : **1** org	Tenaga Kontrak : **2** org
	Lainnya : **19** org	



HASIL ANALISIS DATA IPAK

Berdasarkan Kritera standar nasional siSUPER

Preview Publikasi

Ringkasan Nilai | Data Umum Responden | Domisili | Umur | Layanan | Nilai Unsur | Tindak Lanjut

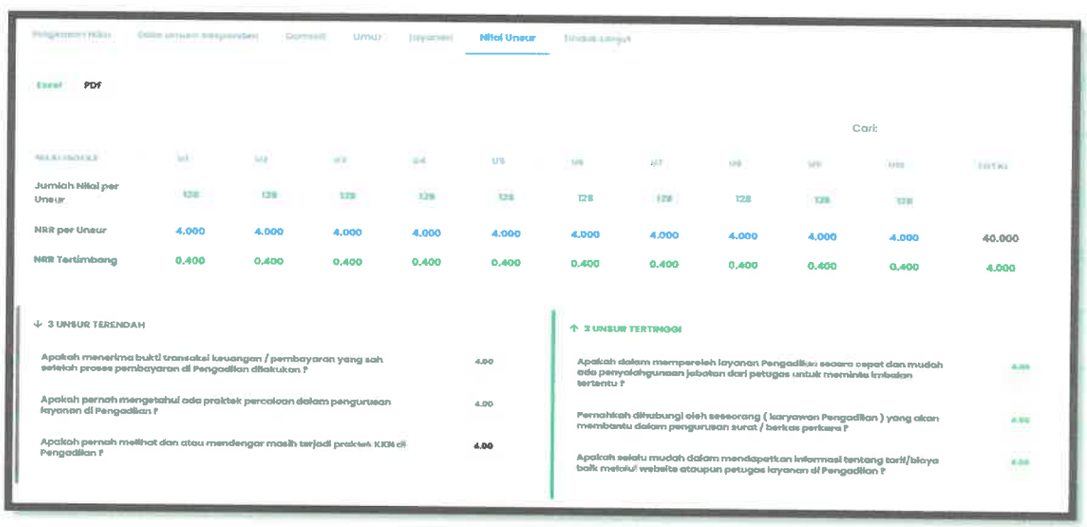
NILAI INDEKS IPAK

PENGADILAN NEGERI SANGATTA

4,00 / 100,00 %

Periode: 1 Juli 2026 s/d 30 September 2026

JUMLAH	**32 Responden**	
GENDER	Laki-Laki : 17 org	Perempuan : 15 org
PENDIDIKAN	Tidak/Belum Sekolah : 1 org	Diploma 2 : 0 org
	SD : 0 org	Diploma 3 : 0 org
	SMP : 0 org	Sarjana S1 : 18 org
	SMU : 10 org	Magister S2 : 3 org
	Diploma 1 : 0 org	Doktor S3 : 0 org
PEKERJAAN	ASN(PNS/PPPK) : 3 org	Wiraswasta : 7 org
	TNI : 0 org	Wirausaha : 0 org
	Polri : 1 org	Tenaga Kontrak : 2 org
	Lainnya : 19 org	



Pengisian Nilai | Data umum responden | Domisili | Umur | Layanan | **Nilai Unsur** | Tindak Lanjut

Excel PDF

Cari:

Jumlah Nilai per Unsur	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	
NRR per Unsur	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	40.000
NRR Tertimbang	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400	4.000

↓ 3 UNSUR TERENDAH

Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ?	4.00
Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan ?	4.00
Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan ?	4.00

↑ 3 UNSUR TERTINGGI

Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu ?	4.00
Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ?	4.00
Apakah sekalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ?	4.00